



#TransformYourFinancialJourneyWithUs

# PT BPR VIMA (d/h ADHIERRESA) LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT VIMA  
Jl. SUNDA 52 A BANDUNG 40112  
TELEPON 022-63196130  
Email : [info@bankvima.com](mailto:info@bankvima.com)  
WEBSITE : [www.bankvima.com](http://www.bankvima.com)  
Instagram : [bank.vima](https://www.instagram.com/bank.vima)



## PENGANTAR

Laporan Transparansi pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat dan disusun untuk memenuhi kewajiban BPR dalam melaksanakan :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah ;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

BPR Adhierresa melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Keadilan dan Kewajaran dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Penerapan tata kelola yang baik diharapkan akan mendorong setiap organ BPR Adhierresa untuk selalu menekankan budaya Tata Kelola dalam setiap pengambilan keputusan yang dilandasi nilai dan norma yang berlaku serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, meningkatkan kinerja, *coporate value* dan daya saing yang kuat serta akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor dalam menempatkan BPR Adhierresa sebagai pilihan dalam kegiatan perbankan .

## LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

<b>Nama BPR</b>	<b>: PT BPR VIMA (d/h BPR ADHIERRESA)</b>
<b>Alamat</b>	<b>: Jl. SUNDA 52 A BANDUNG 40112</b>
<b>Nomor Telepon</b>	<b>: 022- 63196130</b>
<b>Penjelasan Umum</b>	<p>Penguatan penerapan Tata Kelola penting dilakukan oleh BPR untuk menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks dalam rangka peningkatan daya saing BPR . Tata Kelola yang Baik pada BPR akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR sehingga penguatan penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dapat mendorong pertumbuhan BPR yang stabil dan berkelanjutan. Penguatan penerapan Tata Kelola yang Baik diperlukan seiring dengan perkembangan inovasi produk dan teknologi informasi yang meningkatkan risiko pada BPR.</p> <p>PT. BPR Adhierresa sebagai Bank yang melaksanakan fungsi intermediasi, harus mengimplementasikan prinsip-prinsipTata Kelola atau Good Corporate Governance dalam setiap aspekpengelolaan perusahaan. Bank menyadari bahwa keberlangsunganeksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan,dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan penerapan Good Corporate Governance.</p> <p>Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga kelangsungan usaha (sustainability) dalam jangka panjang sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai.</p>
<b>Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola</b>	2 (BAIK )
<b>Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola</b>	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum memiliki nilai BAIK . Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola yang memadai meskipun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen BPR dengan tindakan normal .

## B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	<b>Euis Yanti Rokayah</b>
	Jabatan	<b>Direktur</b>
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab**)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;</li> <li>b. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</li> <li>c. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</li> <li>d. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.</li> <li>e. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah dan auditor ekstern;</li> <li>f. Direksi wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain.</li> </ul>
	<p><b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</b> Direksi senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada RBB yang telah disetujui dalam setiap kegiatan operasional BPR . RBB menjadi pedoman dalam operasional BPR, pemutus kebijakan dan pengendalian perusahaan.</p>	

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	<b>Nama</b>	<b>Viarine Pranata</b>
	<b>Jabatan</b>	<b>Komisaris Utama</b>
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>	<p>Memimpin Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan penerapan manajemen risiko sesuai Peraturan OJK yang berlaku ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;</li> <li>b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR;</li> <li>c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR auditor ekstern; dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain;</li> <li>d. Membuat dan memelihara risalah rapat. Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Pemegang Saham atau RUPS dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</li> </ol>
2	<b>Nama</b>	<b>Reza Widjaja</b>
	<b>Jabatan</b>	<b>Komisaris</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;</li> </ol>

		<p>b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR;</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR auditor ekstern; dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain;</p> <p>d. Membuat dan memelihara risalah rapat. Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Pemegang Saham atau RUPS dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
--	--	--

*\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan*

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite *)
1.	Komite Audit / Komite Pemantau Risiko / Komite Remunerasi dan Nominasi/ Komite Manajemen Risiko / Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab
	Program Kerja
	Realisasi
	Jumlah Rapat
	BPR belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK *)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.									
2.		BPR belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi							

**C. pemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	*	Euis Yanti Rokayah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	*	Viarine Pranata	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	*	Reza Widjaja	Tidak Ada	Tidak Ada	900.000.000,-	3,42

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	NIK *)	Nama Direksi	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	*	Euis Yanti Rokayah		Tidak Ada	

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	NIK *)	Nama Direksi	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	*	Viarine Pranata		Tidak Ada	
2	*	Reza Widjaja		Tidak Ada	

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*	Euis Yanti Rokayah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	NIK *)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*	Viarine Pranata	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	*	Reza Widjaja	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*	Euis Yanti Rokayah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*	Viarine Pranata	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	*	Reza Widjaja	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Thn )	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	27.000.000,-	2	11.400.000,-
2.	Tunjangan	2	8.000.000,-	2	570.000,-
3.	Tantiem	0	0	0	0
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi lainnya**)	0	0	0	0
Total Remunerasi			35.000.000,-		11.970.000,-
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	0	0	0	0
2.	Transportasi	0	0	0	0
3.	Asuransi kesehatan	0	0	0	0
4.	Fasilitas lainnya***)	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			35.000.000,-		11.970.000,-

**H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,19
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,23
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,67

**I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun**

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	Senin, 15 Januari 2024	3	Pemenuhan dokumen-dokumen Akuisisi & Kredit yang diberikan
2.	Sabtu, 20 April 2024	3	Pemenuhan Dana dan penyaluran kredit , Penyelesaian kredit macet dan kegiatan operasional BPR
3.	Senin, 19 Agustus 2024	3	Persiapan Pelaksanaan Pengambilalihan PT BPR Adhierresa
4.	Senin, 02 Desember 2024	3	Perubahan Nama BPR dan kepindahan lokasi Kantor BPR

**J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	*	Viarine Pranata	4	0	100
2.	*	Reza Widjaja	4	0	100

*\*)NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.*

**K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)**

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian**)	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0				0

**L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak Ada	Tidak Ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak Ada	Tidak Ada
<b>Total</b>		

**M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.		Reza Widjaja	Komisaris		Komite		Sewa Gedung	1.500,-	Akhir sewa Januari tahun 2032. Setelah Proses Akuisisi berakhir Oktober 2025

\*NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP*	Jumlah (Rp)
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
dst.						

Bandung, April 2025  
**PT BPR VIMA (d/h PT BPR ADHIERRESA)**



**Viarine Pranata**  
Komisaris Utama



**Euis Yanti.R**  
Direktur